

## KEMUNDURAN DEMOKRASI: ANALISIS BIBLIOMETRIK ATAS DATA DI INDEKS SCOPUS TAHUN 2010-2023

Ali Noer Zaman<sup>1</sup>, Ma'mun Murod<sup>2</sup>), Djoni Gunanto<sup>3</sup>), Rival Laosa<sup>4</sup>), Assyiffah Aulia<sup>5</sup>), Zuly Qodir<sup>6</sup>)

<sup>1,2,3,4,5</sup>) Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>6</sup>) Program Doktor Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

\* [alinoerzaman@umj.ac.id](mailto:alinoerzaman@umj.ac.id)

### Abstrak

Kemunduran demokrasi merupakan persoalan yang banyak dibahas oleh para ahli ilmu politik akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan kemunduran demokrasi terjadi di berbagai belahan dunia, baik di negara-negara yang memiliki tradisi demokrasi yang telah mapan maupun di negara-negara yang belum lama terbebas dari pemerintahan otoriter. Namun berbeda dengan kemunduran demokrasi di tahun 1970-an, di mana pemerintahan demokratis tumbang oleh tindakan kudeta militer, akhir-akhir ini kualitas demokrasi di berbagai negara mengalami kemunduran melalui proses-proses yang berbeda, seperti pelemahan institusi demokrasi oleh pemerintahan yang terpilih secara demokratis dengan tujuan untuk memperpanjang kekuasaannya atau karena ia dikendalikan oleh sebuah kekuatan oligarki. Studi-studi tentang kemunduran demokrasi tentu saja telah dilakukan oleh para ahli. Hanya saja belum ditemukan sebuah studi yang mempelajari hasil-hasil kajian tersebut dari sebuah indeks data yang terpadu. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis bibliometrik atas artikel-artikel yang telah dipublikasikan di gudang data Scopus, yang selama ini telah dikenal sebagai salah satu gudang data terbesar, di mana karya-karya yang ada telah mengalami proses peninjauan secara ketat. Dengan penelitian tersebut, diharapkan bisa diketahui kecenderungan penelitian tentang kemunduran demokrasi, jurnal dan para penulis yang berpengaruh, dan peluang-peluang baru penelitian dalam isu tersebut. Metode yang dipakai adalah dengan mengambil (ekstrak) data CSV dalam bentuk abstrak, judul artikel, dan kata kunci dari artikel-artikel yang berkaitan dengan kemunduran demokrasi. Data CSV kemudian diolah dengan aplikasi Vosviewer untuk mengetahui kecenderungan penelitian, isu-isu yang banyak diperdebatkan, dan relasi antara penulis dan kekuatan sitasi jurnal. Penelitian ini juga memanfaatkan analisa data yang disediakan oleh Scopus sendiri.

Kata Kunci: Demokrasi, Bibliometrik, Vosviewer, Scopus

## PENDAHULUAN

Kemunduran demokrasi merupakan sebuah proses perubahan rezim menuju otokrasi yang membuat pelaksanaan kekuasaan politik menjadi lebih sewenang-wenang dan represif (Hyde, 2020). Pemerintahan yang berkuasa berusaha membatasi ruang kontestasi publik dan partisipasi publik melalui cara-cara yang tidak demokratis (Cassani et.al, 2019). Para ahli memberi sebutan yang tidak seragam terhadap fenomena kemunduran demokrasi ini, seperti *democratic backsliding*, *democratic decline*, *de-democracy*, *the death of democracy*, *democratic regression*, dan *de-consolidation of democracy*. Ada berbagai sebab mengapa demokrasi mengalami kemunduran, seperti kurangnya dukungan publik terhadap demokrasi, ketidaksetaraan ekonomi, reaksi konservatif terhadap perubahan sosial, politik populis dan personalisme, dan pengaruh luar dari politik negara-negara besar. Selain itu, polarisasi politik yang mendalam, rasisme dan nativisme, dan kekuasaan eksekutif yang berlebihan, serta budaya anti kebebasan (terhadap fenomena seperti LGBT) juga bisa menjadi faktor penyebab kemunduran demokrasi (Stenner, 2021).

Sejak berakhirnya Perang Dingin di tahun 1990-an, telah terjadi penurunan perubahan rezim melalui kudeta militer. Namun terhadap negara-negara yang mengalami demokrasi pada gelombang ketiga di akhir abad kedua puluh, rezim-rezim demokratis tersebut memiliki institusi yang lemah (Bermeo, 2016). Oleh karena itu tidak mengherankan jika sejak tahun 2021, seperempat penduduk dunia hidup di bawah rezim hibrida yang mengalami kemunduran demokrasi (Idea, 2021). Bentuk-bentuk kemunduran tersebut di antaranya adalah kualitas pelaksanaan pemilu yang kurang jujur dan adil, berkurangnya kebebasan dalam berbicara, pers, dan berasosiasi, sehingga terjadi kemunduran dalam menuntut pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan. Penegakkan hukum mengalami kemunduran akibat lemahnya pengawasan publik. Pemerintah terlalu memberi penekanan berlebihan terhadap keamanan nasional sebagai respon terhadap tindakan terorisme atupun mereka yang dianggap membahayakan keamanan negara (Lindberg, 2021; Huq & Ginsburg, 2017)). Faktor penolakan terhadap kebudayaan liberal juga bisa menurunkan kualitas demokrasi (Huntington, 2012).

Pembahasan tentang kemunduran demokrasi telah banyak dilakukan. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam pencarian data di scopus. Pencarian dengan kata kunci *democratic backsliding* menemukan setidaknya 570 karya. Jika dibatasi hanya karya berbentuk artikel, book chapter, dan buku, serta subjek area dalam bidang ilmu sosial humaniora, maka didapati karya sebanyak 501. Karya-karya tersebut ditulis antara tahun 2014 hingga 2023. Penelitian-penelitian dengan model analisis bibliometrik sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun yang khusus berkenaan dengan kemunduran demokrasi berdasarkan data Scopus sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan.

Dari penelusuran di data Scopus dengan menggunakan kata kunci *bibliometric analysis*, didapatkan hasil sebanyak 24,210 dokumen. Setelah dipilah melalui pembatasan dalam bidang ilmu sosial, karya hanya dalam bentuk artikel, dan ditulis dalam bahasa Inggris, serta kata kunci *bibliometric analysis*, maka didapatkan hasil sebanyak 1,437 dokumen yang kebanyakan tentang manajemen, pendidikan, wisata, ekonomi, dan kesehatan.

Salah satu artikel tersebut berjudul "Online Learning in Management Education amid the Pandemic: A Bibliometric and Content Analysis" (Ng et al., 2023). Karya ini menelaah dengan analisis bibliometric terhadap 920 makalah, dengan menggunakan kata kunci *management*

education dan online learning. Penelitian menemukan bahwa publikasi di bidang tersebut terkonsentrasi di negara-negara maju, sementara negara-negara Eropa mengambil proporsi terbesar. Lima sub tema yang menarik perhatian penelitian adalah pedagogi, teknologi, metode asesmen, hasil pengajaran, keterampilan, dan tantangan. Kontribusi teoritis yang utama dari penelitian jenis ini adalah pentingnya menggabungkan *blended learning* dan pendidikan manajemen.

Artikel lain berjudul "Smart Tourism Destination: A Bibliometric Review" (Ercan, 2023). Sumber pengambilan artikel adalah gudang data Web of Science (WoS) mengenai tujuan smart tourism. Yang dianalisis adalah negara yang paling produktif, paling kolaboratif, jaringan co-sitasi, dan pengarang, jaringan co-sitasi pengarang, dan pengarang yang paling banyak dirujuk. Data diambil dari 1975-Desember 2021 dan ditemukan 75 artikel. Berdasarkan data tersebut Spanyol adalah negara yang paling banyak memproduksi artikel, negara paling kolaboratif. Institusi yang paling produktif adalah Universidad de Alicante, sementara artikel yang paling banyak dikutip adalah karya oleh Boes et al., berjudul "Smart Tourism Destinations: Ecosystems for Tourism Destination Competitiveness," sedangkan pengarang co-sitasi terbanyak adalah Ulrike Gretzel.

Permasalahan: Bagaimanakah kecenderungan penelitian tentang kemunduran demokrasi berdasarkan data yang terdapat di Scopus dengan menggunakan analisis bibliometrik?

Urgensi Penelitian: Penelitian dengan model analysis bibliometric tentang kemunduran demokrasi ini dirasa penting, karena berdasarkan penelusuran di data Scopus, sebagai gudang data terindeks yang paling besar di dunia, belum menemukan karya yang melakukan penelitian serupa. Padahal, masalah kemunduran di demokrasi sedang banyak dibicarakan para ahli. Bahkan di Indonesia dan Asia Tenggara, para pengamat seperti Mietzner (2021), telah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang bergerak dari stagnasi menuju kemunduran demokrasi.

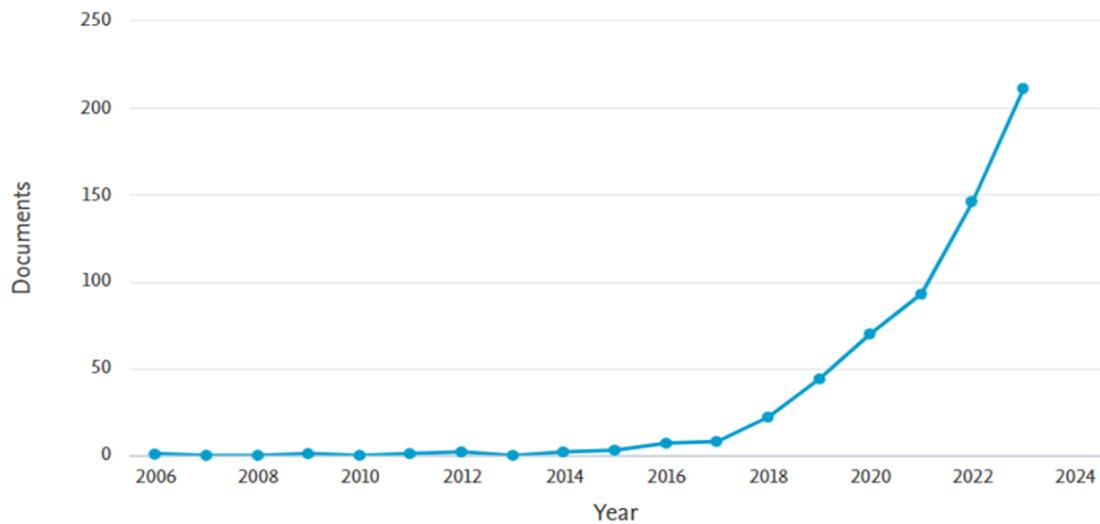
## METODE

Pencarian data dilakukan pada tanggal 29 November 2023 di gudang data Scopus dengan kata kunci "democratic backsliding" dalam kategori kata kunci, judul artikel dan abstrak. Data CSV kemudian diolah dengan aplikasi vosviewer untuk mengetahui kecenderungan penelitian, isu-isu yang banyak diperdebatkan, dan relasi antara penulis dan kekuatan sitasi jurnal. Sedangkan analisa scopus dipakai untuk membahas konten dari klasifikasi setiap kategori yang telah dihasilkan melalui aplikasi Vosviewer. Penggunaan analisis bibliometrik dalam penelitian merupakan sebuah metode untuk menelusuri kaitan antara sitasi jurnal (Schaer, 2013), di mana data dari indeks sitasi bisa dianalisis untuk menentukan popularitas dan pengaruh dari artikel, penulis, dan publikasi. Hal tersebut merupakan praktik yang umum dilakukan di akhir abad ke-20 (Fenner, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

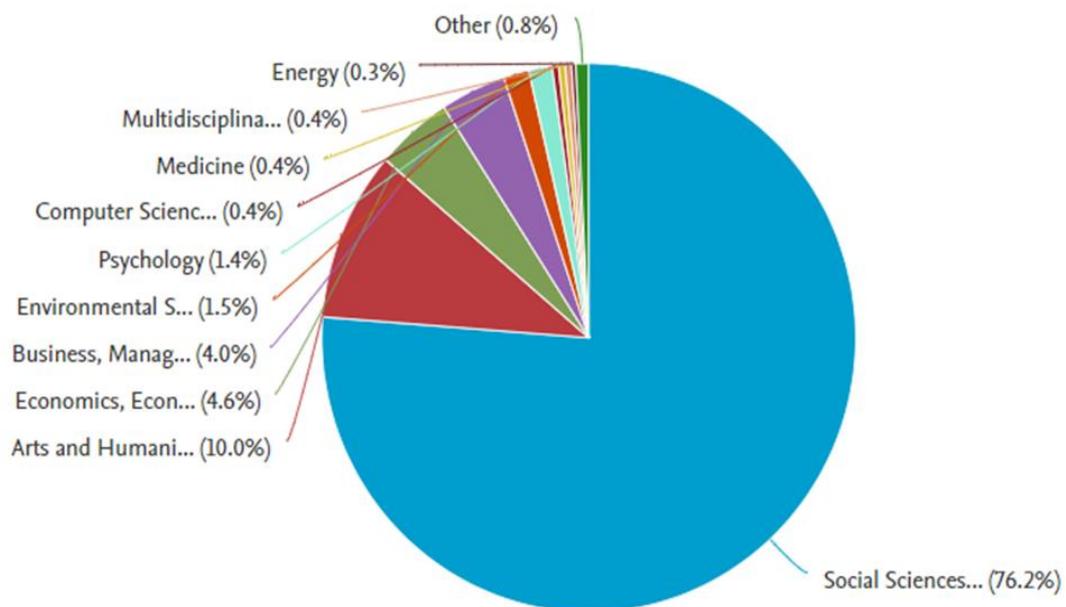
Berdasarkan tahun penerbitan, penulisan paling intensif tentang kemunduran demokrasi dimulai tahun 2016 (8), yang kemudian terus mengalami peningkatan. Misalnya tahun 2018 sebanyak 22, meningkat menjadi 44 pada tahun 2019, dan meningkat dua kali lipat pada tahun

2019. Jumlah ini semakin bertambah hingga mencapai jumlah tertinggi sebanyak 146 pada tahun 2022, dan 211 pada tahun 2023.



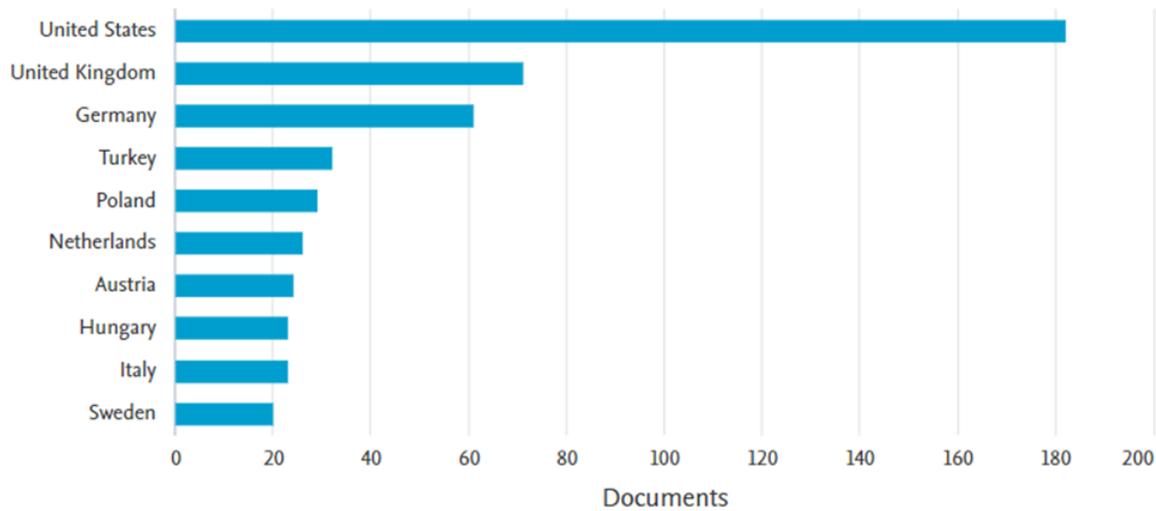
**Gambar 1.** Dokumen menurut tahun

Berdasarkan subjek area yang mengkaji kemunduran demokrasi, maka social sciences menduduki posisi yang paling tinggi (76,2%), disusul Arts and Humanities (10%), Economics, Econometrics and Finance (4.6%), Business, Management and Accounting (4%), dan Environmental Science (1.5%). Bidang-bidang yang lain tidak memiliki jumlah dokumen yang signifikan.



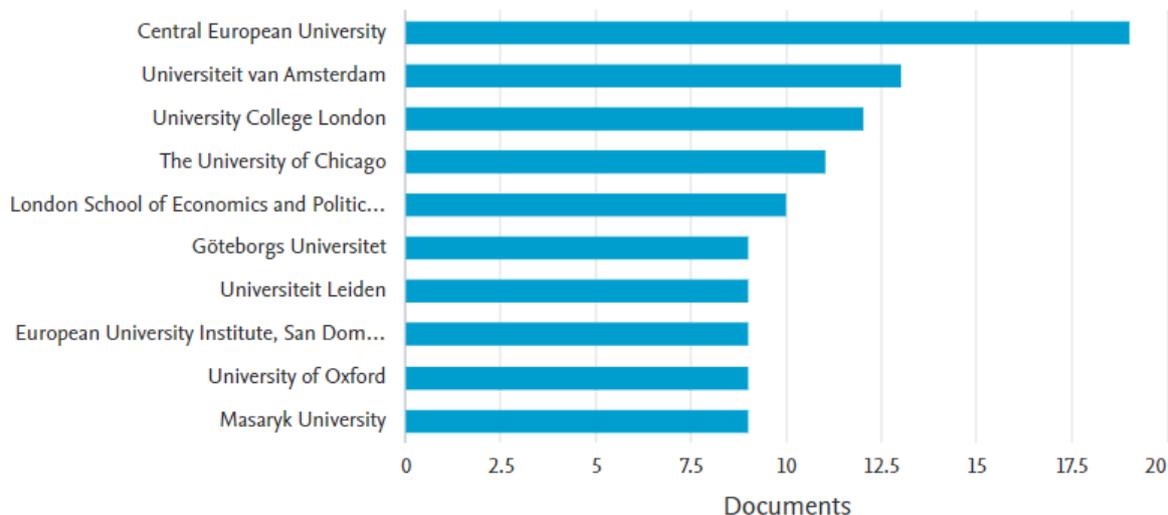
**Gambar 2.** Dokumen menurut Bidang Ilmu

Jika dilihat berdasarkan kategori negara, Amerika Serikat adalah negara penghasil karya paling banyak tentang kemunduran demokrasi (182 dokumen), diikuti Inggris (71), Germany (61), Turkey (32), Poland (29), Netherlands (26), Austria (24), Hungary (23), Italy (23), dan Swedia (20).



**Gambar 3.** Dokumen menurut Negara

Tetapi jika dilihat berdasarkan kategori lembaga penghasil karya, maka didapati bahwa lembaga-lembaga yang menempati urutan sepuluh tertinggi dalam dokumen tentang kemunduran demokrasi didominasi oleh lembaga-lembaga dari Uni Eropa. Central European University (19), Universiteit van Amsterdam (13), University College London (12), The University of Chicago (11), London School of Economics and Political Science (10), Goteborgs Universitet (9), Universiteit Leiden (9), European University Institute, San Domenico di Fiesole (9), University of Oxford (9), dan Masaryk University (9).



**Gambar 4.** Dokumen menurut Lembaga Penerbit

Sepuluh artikel dengan Sitasi Tertinggi  
 Dari pencarian di Scopus dengan kata kunci “democratic backsliding” pada tanggal 29 November 2023, berikut ini daftar artikel yang paling banyak dikutip:

**Tabel 1.** Daftar Karya Paling Banyak Disitasi

No	Title	Author	Publisher	Year of Publication	Number of Citation
1	On Democratic Backsliding	Nancy Bermeo	Journal of Democracy 27 (1), pp. 5-19.	2016	652
2	A Third Wave of Autocratization is here: What is New about it	Anna Lührmann and Staffan I Linbërg	Democratization 26 (7), pp. 1095-1113	2019	444
3	Rising competitive authoritarianism in Turkey	Bergesen and Sebnem Gumuscu,	Third World Quarterly 37 (9), pp 1581-1606	2016	404
4	Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding	David Waldner and Ellen Lust,	Annual Review of Political Science, 21, pp. 93-113.	2018	266.
5	Anchoring Democracy from Above? The European Union and Democratic Backsliding in Hungary and Romania after Accession	Ulrich Sedlmeier	Journal of Common Market Studies, 52 (1), pp.105-121.	2014	191
6	An Externally Constrained Hybrid Regime: Hungary in the European Union	András Bozóki and Dániel Hegedűs	Democratization, 25 (7), pp. 1173-1189.	2018	159
7	Understanding the Illiberal Turn: Democratic Backsliding in the Czech Republic,	Seán Hanley and Milada Anna Vachudova,	East European Politics	2018	156

8	Rethinking "Democratic Backsliding" in Central and Easter Europe-Looking Beyond Hungary and Poland	Licia Cianetti, and James Dawson, and Seán Hanley	East European Politics, 34 (3), pp. 243-256.	2018	137
9	Orbán's Laboratory of Illiberalism	Péter Krekó and Zsolt Enyedi	Journal of Democracy	2018	129
10	How to Lose a Constitutional Democracy	Aziz Huq and Tom Ginsburg	UCLA Law Review, 65 (1), pp. 78-169	2018	122

*On Democratic Backsliding*, ditulis oleh Bermeo pada tahun 2016 dengan sitasi sebanyak 652. Sebagaimana ditunjukkan oleh judulnya, artikel ini menyoroiti sebab-sebab mengapa sebuah demokrasi mengalami kemunduran. Menurut penulis, telah banyak sarjana yang mengkaji masalah ini terutama dari sudut pandang korelasi ekonomi dan institusional tetapi masih jarang dari sudut pandang pilihan dan para pemilihnya. Secara mendasar, kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) dipahami sebagai menghilangnya atau melemahnya institusi pendukung demokrasi akibat tindakan negara. Tentu saja ada banyak institusi (misalnya parlemen) dan aktor pendukung demokrasi (monarch, presiden, kalangan militer). Menurut Bermeo ada tiga tahapan kudeta, yang terlihat dalam sejarah. Pertama, kudeta terang-terangan di masa perang dingin, yang diganti oleh kudeta janji-janji; kedua, kudeta eksekutif telah digantikan oleh *aggrandizement coup d'etat*, dan, ketiga, *election day vote fraud* digantikan oleh *strategic harassment and manipulation*.

Kemunduran demokrasi mengarah pada runtuhnya institusi demokrasi. Proses kemunduran demokrasi berjalan secara perlahan, dan mengarah pada bentuk pemerintahan yang hibrid, dan bukan sama sekali merupakan pergantian rezim. Bermeo menyatakan, "...*Democratic backsliding can thus constitute democratic breakdown or simply the serious weakening of existing democratic institutions for undefined ends*. Dalam hal ini, ada tiga positif trends yang muncul: Pertama, mulai menghilangnya kudeta klasik, yang biasanya dilakukan oleh elite militer atau elite lain untuk mengganti pemerintahan yang ada. Berdasarkan data dari tahun 1945 hingga 2014, jumlah upaya kudeta militer maupun kudeta yang berhasil telah menurun. Meskipun akhir-akhir ini terjadi kudeta, namun jumlahnya masih sedikit dibandingkan di tahun-tahun selama Perang Dingin. Kedua, mulai menghilangnya kudeta eksekutif. Hal ini dilakukan oleh eksekutif yang terpilih secara jujur tetapi kemudian menunda atau membatalkan konstitusi yang mengundang kekuatan massa sebagaimana terjadi pada pengambilan kekuasaan oleh Ferdinand Marcos (Filipina 1965-1986), Alberto Fujimori (Peru 1992), Levon Ter-Petrossian di Armenia (1995), Alyaksandr Lukashenko (Belarus 1995), Frederick Chiluba di Zambia (1996), dan René Préval di Haiti (1999). Ketiga, kecurangan pada saat pemilu, yang mulai berkurang akibat adanya pengawasan pemilu. Oleh karena itu, kecurangan dilakukan melalui cara-cara yang lebih tidak kasat mata.

Kemunduran demokrasi menghadapi bentuk-bentuk yang perlu diwaspadai. Pertama, kudeta janji-janji, yakni sebuah elite melakukan kudeta terhadap pemerintahan terpilih dengan

alasan mempertahankan legalitas demokrasi dan berjanji mengadakan pemilu segera untuk memulihkan demokrasi. Jumlah kudeta seperti ini telah meningkat akhir-akhir ini, dari 35 persen menjadi 85 persen setelah tahun 1990. *Executive aggrandizement*: hal ini terjadi ketika eksekutif terpilih melemahkan check pada kekuasaan eksekutif, satu demi satu, dan mengusahakan serangkaian perubahan institusional yang membuat kekuatan pasukan oposisi tidak mampu menantang preferensi eksekutif. Pelemahan institusi yang akan bisa menentang eksekutif tersebut dilakukan melalui saluran legal, sering menggunakan pertemuan atau referendum konstitusional yang baru terpilih. Hal tersebut juga dilakukan oleh pengadilan atau anggota legislatif, media, dan upaya lain untuk melemahkan oposisi. Contoh hal ini terjadi di Turki di bawah Presiden Erdogan. Kedua, memanipulasi pemilu secara strategis. Hal tersebut dilakukan misalnya dengan menghalangi akses media, menggunakan dana pemerintah untuk kampanye, menghalangi kandidat oposisi agar tidak bisa mengikuti pemilu, mengatur komisi pemilu, dan membuat aturan yang menguntungkan penguasa, dan melemahkan oposisi. Untuk menghadapi kemunduran tersebut, Bermeo menyarankan beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti perubahan yang perlahan, response rasional, menegaskan mana yang ambigu dan yang tidak, dan mengupayakan berbagai tindakan yang lebih baik,

*Third Wave of Autocratization is here: What is New about it?* Ditulis oleh Lührmann dan Linberg pada tahun 2019, dan dikutip sebanyak 444 kali. Artikel ini menghadirkan secara sistematis analisis empiris perkembangan autokratis kontemporer menurut perspektif sejarah. Kontribusinya adalah mengidentifikasi metode baru periode autokratis *gradual*, dengan memberikan tinjauan empiris komprehensif perubahan rezim yang merugikan, dari tahun 1900 hingga sekarang, di seluruh spektrum demokrasi-autokrasi, sehingga bisa diidentifikasi awal dan akhir proses autokrasi. Berdasarkan temuan dinyatakan bahwa autokrat kontemporer menggunakan strategi legal dan gradual untuk meruntuhkan demokrasi. 68% episode autokratis kontemporer di negara-negara demokrasi dipimpin oleh petahana, yang berkuasa secara legal dan dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Sebaliknya, selama pra periode ketiga, sebagian besar autokratis melakukan pengambilan kekuasaan secara ilegal, seperti kudeta militer. Jika para otokrat sebelum gelombang ketiga secara jelas melakukan langkah-langkah seperti membuat konstitusi non-demokratis yang baru atau membubarkan parlemen, sebagian besar otokrat kontemporer tidak mengubah aturan-aturan formal. Oleh karena itu, cara petahana meruntuhkan demokrasi menjadi lebih informal dan lebih tersembunyi.

*Rising Competitive Authoritarianism in Turkey*, ditulis oleh Essen dan Gumuscu tahun 2016, dan dikutip sebanyak 404. Artikel ini menyatakan bahwa sejak AKP (Justice and Development Party) berkuasa di tahun 2002, Turki mengalami transisi rezim ganda. Pertama, berakhirnya demokrasi yang mengawasi. Kedua, munculnya rezim otoritarian yang kompetitif. Berdasarkan praktik pemilu di tahun 2015 dan kecenderungan politik Turki yang lebih luas, bisa dibuktikan bahwa pemilu tidak lagi jujur; kebebasan sipil dilanggar secara sistematis; dan medan pertempuran sangat diarahkan untuk mendukung AKP. Dengan demikian Turki telah berevolusi menjadi sebuah rezim otoriter yang kompetitif. Apa yang dimaksud dengan otoritarianisme kompetitif? Tidak seperti autokrasi yang penuh (*fully fledged autocracies*), otoritarianisme kompetitif (*Competitive authoritarian regimes*) menyelenggarakan pemilu secara regular sebagai alat utama untuk mendapatkan kekuasaan. Tetapi pemerintah yang secara partisan menggunakan institusi negara telah membuat oposisi mustahil mengalahkan

petahana, sehingga memunculkan kasus-kasus yang tidak demokratis. Sebagaimana dikatakan oleh Levitsky and Way, " *such regimes are competitive in that opposition parties use democratic institutions to contest seriously for power, but they are not democratic because the playing field is heavily skewed in favor of incumbents*. Kompetisi dalam kasus seperti itu riil tetapi tidak fair. Pemerintah juga mengontrol media untuk membatasi akses kelompok oposisi ke para pemilih dan memperlemah kampanye politiknya. Terakhir, para kritikus pemerintah diancam, dipermalukan, dan terkadang dipersekusi. Akibat pemerintah memiliki akses menguntungkan pada sumber daya kekuasaan dan institusi, maka kelompok oposisi menghadapi medan pertempuran (*playing field*) yang tidak setara melawan partai penguasa.

*Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding*, yang ditulis oleh David Waldner and Ellen Lust, 2018 dan dikutip sebanyak 266. Artikel ini membahas kemunduran demokrasi berdasarkan konsep, operasional, dan teoritis. Ada dua tantangan dalam menjelaskan hal-hal tersebut, yakni tantangan defisional, yang mencakup bagaimana memahami pengertian *democratic backsliding*, dan tantangan metodologis, yakni bagaimana mengukur negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi, yang mencakup sebab-sebab transisi ke demokrasi, keretakan demokrasi, ketahanan demokrasi, dan konsolidasi demokrasi. Jika semua ini berhasil dipecahkan maka bisa menjadi titik berangkat bersama bagi para sarjana dalam melakukan penelitian mengenai kemunduran demokrasi.

*Anchoring Democracy from Above? The European Union and Democratic Backsliding in Hungary and Romania after Accession*, ditulis oleh Sedlmeier, tahun 2014, dan dikutip sebanyak 191. Artikel ini membahas reaksi Uni Eropa terhadap pelanggaran praktek demokrasi di Hungaria dan Rumania selama tahun 2012-2013 sebagai ukuran untuk menilai kapasitas Uni Eropa dalam mempertahankan demokrasi di negara-negara anggotanya. Menurut artikel ini, politik partisan dan konsensus normatif yang lemah telah membuat Uni Eropa tidak mampu menerapkan sanksi sebagaimana termuat dalam Artikel 7. Instrumen-instrumen yang digunakan oleh lembaga-lembaga Uni Eropa - tekanan sosial, prosedur pelanggaran (*infringement procedures*) dan pengaitan isu (*issue linkage*) - telah dipakai secara berbeda-beda menurut isu dan negara. Di Hungaria, perubahan ke arah praktik illiberal secara umum masih terbatas. Keberhasilan Uni Eropa di Rumania memberi kesan bahwa dibutuhkan kekuatan untuk melawan kemunduran demokrasi berupa konstelasi kondisi yang mendukung tekanan sosial dan material.

*An Externally Constrained Hybrid Regime: Hungary in the European Union*, ditulis oleh Bozóki and Hegedűs di tahun 2018 dan telah dikutip sebanyak 159 kali. Artikel ini memfokuskan pada karakteristik unik dari rezim hibrida Hungaria, inkarnasi baru dari sistem politik Hungaria yang berlangsung dalam proses kemunduran demokrasi. Artikel ini berargumen bahwa keanggotaan Hungaria di Uni Eropa, kompetensi lembaga Uni Eropa, dan wilayah hukum Uni Eropa memainkan peran penting dalam perkembangan karakteristik sistem yang unik. Dalam kesimpulan dinyatakan bahwa Hungaria merupakan "rezim hibrida" yang dikungkung secara eksternal. Uni Eropa tidak hanya menjadi sistem yang mengungkung rejim Hungaria, tetapi juga menjalankan sistem dukungan dan legitimasi.

*Understanding the Illiberal Turn: Democratic Backsliding in the Czech Republic*, yang ditulis oleh Hanley and Vachudova tahun 2018 dan telah dikutip sebanyak 156. Menurut artikel ini, kemunduran demokrasi paling akut di Eropa Tengah terjadi di Hungaria dan Polandia, yang

pernah dianggap sebagai garda depan demokratisasi. Artikel ini mengeksplorasi perkembangan yang bisa mengarah kepada kemunduran demokrasi di negara lain, yakni Republik Ceko. Analisanya berpusat pada gerakan populis dan anti korupsi dari ANO, yang dipimpin oleh milioner Andrej Babiš, yang menjadi partai Ceko terbesar di bulan Oktober 2017 setelah memenangkan pemilu parlemen. Ditemukan bahwa meskipun ANO memiliki dukungan elektoral yang lebih terbatas ketimbang partai-partai pemerintah yang illiberal di Polandia dan Hungaria, dan kekurangan narasi nasionalis yang populer, namun terdapat kesamaan dalam hal taktik dan bentuk mengkonsentrasikan kekuasaan, meskipun berbeda dalam waktu dan rangkaian. Ada beberapa perbedaan yang bisa diidentifikasi. Pertama, rangkaian peristiwa yang mengarah pada konsentrasi kekuasaan itu berbeda. Di Republik Ceko, akumulasi kekuatan ekonomi dan media yang luas mendahului tantangan elektoral populis. Jika Partai Fidez di Hungaria adalah partai yang telah mengembangkan jaringan oligarki setelah mengambil alih kekuasaan, Partai Babis di Republik Czech adalah oligarki yang membangun dan mengembangkan partainya sendiri. Kedua, bagi ANO, kekuasaan dalam bidang ekonomi dan media bertindak sebagai pengganti atau alternatif terhadap partai politik dan struktur civil society yang dibangun oleh Fidesz dan PiS. Ketiga, semua kekuasaan ini telah terakumulasi di tangan individu super kaya Andrej Babis. Keempat, semua kekuasaan ini, yang telah dipakai Babis dan ANO untuk menarik pemilih, lebih teknokratis dibandingkan kelompok nasionalis, yang dibangun melalui perjuangan melawan korupsi oleh komplotan elite yang mapan. ANOS tidak mengeluarkan ancaman kepada bangsa melalui cara-cara yang dilakukan oleh Fidesz atau PiS, tetapi melalui isu ketakutan terhadap para imigran dan pengungsi, dan bekerjasama dengan Presiden Ceko yang memiliki pandangan xenophobia dan anti-Barat.

*Rethinking "Democratic Backsliding" in Central and Eastern Europe-Looking Beyond Hungary and Poland*, yang ditulis oleh Cianetti, Dawson, dan Hanley tahun 2018, dikutip sebanyak 137. Artikel ini ingin memperluas studi regresi demokrasi di luar kasus Polandia dan Hungaria. Artikel ini melakukan kritik terhadap "kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*)" baik sebagai label maupun asumsi kecenderungan di wilayah tersebut; perlunya mengintegrasikan secara lebih baik peran struktur sosio-ekonomi illiberal seperti struktur oligarki atau jaringan korup dalam menyebabkan kemunduran demokrasi; dan perlunya melakukan pengujian kembali terhadap barter antara stabilitas demokrasi dan kualitas demokrasi. Artikel ini akhirnya menyarankan untuk melakukan studi yang lebih interdisipliner, yang bergerak di luar asumsi komparasi politik institusionalis yang sempit.

*Orbán's Laboratory of Illiberalism*, ditulis oleh Krekó and Enyedi tahun 2018 dan telah dikutip sebanyak 129 kali. Artikel ini memberikan penilaian terhadap kebijakan politik illiberal yang dilakukan oleh Orban di Hungaria. Meskipun ideologi populis Hungaria memiliki sisi paternalis yang memisahkan mereka dari partai populis lain, kasus Hungaria merupakan bagian dari kecenderungan yang lebih luas. Kecenderungan nasionalis di Hungaria tentu saja mendapatkan legitimasi dari perubahan lebih luas dunia Barat ke arah politik identitas. Karakter politik Orban tidak bisa dipahami terlepas dari logika politik elektoral yang kompetitif. Tidak seperti pemimpin otoritarian yang lain, Orban tidak ingin menjadi "bapak bangsa". Tujuan besarnya adalah mempolarisasikan dan membagi kelompok pemilih sambil mempertahankan kelompok terbesar dan terorganisir di dalamnya. Hal itu dilakukan melalui metode yang sering non-demokratik, meski berdasarkan logika kompetisi. Kemampuannya yang luar biasa dalam

memobilisasi dukungan merupakan aset elektoral puncak dari partai Fidesz. Apa yang terjadi dalam kemunduran demokrasi Hungaria merupakan akibat dari banyak faktor, beberapa di antaranya khas Hungaria. Model illiberal Orban telah memberi pengaruh besar tidak hanya di Eropa Timur dan tengah, tetapi juga di Balkan Barat. Dalam sebuah upaya "soft power," Orban menggapai negara-negara di Balkan Barat, dan paling sukses dalam mendukung orang kuat lokal (sayap kanan) di Kroasia, Makedonia, Montenegro, Serbia dan Slovenia. Hungaria telah sukses menjadi laboratorium tata kelola pemerintahan yang illiberal. Fidesz telah membentuk kembali institusi negara yang cocok dengan tujuan partai penguasa. Politik identitas dan teori konspirasi banyak bermunculan, sebagaimana media dukungan pemerintah melancarkan berita-berita palsu.

*How to Lose a Constitutional Democracy*, ditulis oleh Huq and Ginsburg tahun 2018 dan telah dikutip sebanyak 122. Artikel ini membahas tentang taksonomi berbagai ancaman kemunduran demokrasi, mekanisme penyingkapannya, dan perbandingan resiko ancaman tersebut di zaman sekarang. Ada dua jalan menuju kebusukan demokrasi, yakni reversi otoritarian dan retrogresi konstitusional. Reversi dipahami sebagai keruntuhan cepat dan lengkap institusi demokrasi. Retrogresi adalah erosi yang lebih lembut (*subtle*) dan sampingan, yang terjadi secara bersamaan di tingkat institusi demokrasi: memudarnya pemilu yang kompetitif, hilangnya hak bebas berbicara dan berasosiasi; dan kendornya kekuasaan hukum yang administratif dan ajudikatif. Di Amerika Serikat dan juga di tempat lain, selama seperempat abad terakhir, resiko reversi telah menurun, tetapi resiko retrogresi meningkat. Benteng konstitusional melawan retrogresi lemah, prospek demokrasi liberal konstitusional lebih banyak bergantung pada kualitas kepemimpinan politik dan resistensi rakyat ketimbang institusi.

#### Analisis Bibliometric Vosviewer

Analisis Vosviewer dilakukan dengan cara menginput data CSV yang telah diambil dari database Scopus. Analisa didasarkan pada perhitungan type occurrence dengan unit analisis di seluruh kata kunci. Perhitungan dilakukan dengan metode penuh. Berdasarkan jumlah kemunculan (occurrences) setiap kata, yang dibatasi 5 kali, maka didapati 89 titik temu dari 1473 kata kunci. Maka, persebaran kata kunci sebagai berikut:



melakukan kebijakan vaksinasi, kewajiban memakai masker, dan *sosial distancing*. Pihak-pihak dalam kubu ini biasanya didukung oleh kelompok demokrat (kiri), sementara kelompok yang menentang kebijakan di atas berasal dari kaum Republikan yang konservatif. Hal ini tampak sangat jelas pada masa Trump yang kontroversial, di mana polarisasi publik sangat nyata dan memperparah polarisasi yang telah terjadi. Akibatnya, demokrasi mengalami kemunduran, bahkan keruntuhan sebagaimana ditunjukkan oleh survei yang dilakukan the Economist Intelligence Unit, di mana demokrasi di Czech Republik, demokrasi dinyatakan sebagai *flawed democracy* (peringkat 25) dan Amerika Serikat berada pada peringkat ke-30.

Kluster ketiga (12 item), yang dinyatakan dalam simpul biru, diwakili oleh kata kunci seperti *akp, authoritarianism, brazil, clientelism, competitive authoritarianism, election, electoral authoritarianism, electoral geography, electoral system, party politics, and turkey*. Kata-kata kunci dalam kluster ini menunjukkan adanya pembahasan mengenai perkembangan demokrasi di Turki, yang ditandai dengan kemunduran demokrasi. Partai Keadilan dan Pembangunan AKP yang dipimpin oleh Erdogan telah lama memimpin negara Turki. Pada awalnya, partai ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap demokrasi. Namun dalam perjalanannya, Erdogan dan elite partai telah menggunakan isu-isu politik identitas yang menyebabkan polarisasi masyarakat Turki. Turki memang telah banyak berubah, namun muncul kecenderungan ke arah otoritarianisme. Hal ini tentu saja mencederai demokrasi di Turki. Maka, tidak mengherankan demokrasi di Turki digolongkan sebagai rezim hibrida, di mana pemerintahan Erdogan menggunakan instrumen demokrasi untuk membungkam kebebasan politik.

Kluster keempat (11 item), yang dinyatakan dalam simpul warna emas, mencakup kata kunci seperti *africa, china, eu, european union, europeanization, foreign policy, governance approach, philippines, political economy, rule of law, voting behavior*.

Kluster kelima (10 item), dinyatakan dalam simpul ungu, mencakup kata kunci seperti *accountability, autocratisation, autocratization, democratic backsliding, democratic resilience, illiberal politics, militant democracy, political parties, social movements, dan southeast asia*. Kluster ini bisa dipahami dalam kerangka perkembangan demokrasi di Asia Tenggara. Demokrasi di wilayah ini memang sedang mengalami kemunduran demokrasi akibat politik yang illiberal. Kebijakan pemerintah yang seperti itu akan mengancam ketahanan demokrasi (*democratic resilience*). Akuntabilitas politik terancam, dan gerakan sosial dan militant democracy tidak bisa berkembang dengan baik.

Kluster keenam (9 item), dinyatakan dalam simpul warna pirus (*turquoise*), mencakup kata-kata seperti *comparative politics, executive aggrandizement, governance, indonesia, latin america, partisanship, presidentialism, public opinion, and support for democracy*. Kluster ini memperlihatkan perkembangan demokrasi di Indonesia dan negara-negara Amerika Latin. Perbandingan politik di antara kedua wilayah tersebut memang dimungkinkan mengingat perkembangan demokrasi sedang mengalami gangguan. Kedua wilayah sama-sama mengalami kemunduran demokrasi akibat kemunculan para pemimpin populis.

Kluster ketujuh (7 item), diwakili dalam simpul oranye, mencakup kata kunci seperti *democratization, political geography, political participation, political violence, popular protest, social movement, dan tunisie*. Artikel-artikel terkait kluster ini membahas perkembangan demokrasi di Tunisia yang dimulai dengan revolusi di Arab (Arab spring) di

tahun 2011 yang berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Ben Ali, kekacauan politik, dan gerakan sosial yang ditimbulkan akibat proses politik antara pro-reformasi dengan mereka yang menentangnya.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari paparan penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa kemunduran demokrasi, dengan kata kunci *democratic backsliding* sedang menimpa banyak demokrasi di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, yang pada tahun 2018, telah diturunkan statusnya menjadi demokrasi cacat (*flawed democracy*). Kajian tentang kemunduran demokrasi terus tumbuh terutama di negara Amerika Serikat dan negara Eropa. Apalagi institusi dan lembaga riset di negara tersebut memiliki banyak dana untuk melakukan penelitian. Kajian tentang kemunduran demokrasi banyak dilakukan di wilayah ilmu sosial, tetapi kajian lain seperti psikologi dan bisnis juga melakukannya karena kemunduran demokrasi mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Dari sepuluh artikel yang paling mendapatkan sitasi, mayoritas artikel tersebut membahas kemunduran demokrasi negara-negara Eropa Timur yakni di negara-negara seperti Hungaria, Rumania, dan Turkey. Selebihnya adalah artikel yang membahas mengenai perkembangan demokrasi, sebab-sebab kemunduran demokrasi, dan peta jalan menuju restorasi demokrasi.

Riset ini mendasarkan diri pada database Scopus, yang sangat mungkin tidak mencakup dokumen, penelitian atau artikel tentang kemunduran demokrasi yang pernah diterbitkan di tempat lain. Oleh karena itu, riset ini menyarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian tentang kemunduran demokrasi dengan berbasis pada sumber lain seperti Google Scholar dan Web of Science.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bermeo, N. (2016). On Democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>
- Bozóki, A., & Hegedűs, D. (2018). An externally constrained hybrid regime: Hungary in the European Union. *Democratization*, 25(7), 1173–1189. <https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1455664>
- Cassani, A., & Tomini, L. (2018). What autocratization is. In *Challenges to Democracy in the 21st Century* (pp. 15–35). Springer International Publishing. [http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-03125-1\\_2](http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-03125-1_2)
- Cianetti, L., Dawson, J., & Hanley, S. (2020). Rethinking “democratic backsliding” in Central and Eastern Europe – looking beyond Hungary and Poland. In *Rethinking ‘Democratic Backsliding’ in Central and Eastern Europe* (pp. 1–14). Routledge. <http://dx.doi.org/10.1201/9780429264795-1>
- Ercan, F. (2023). Smart Tourism Destination: A Bibliometric Review. *European Journal of Tourism Research*, 34, 3409. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v34i.2788>
- Esen, B., & Gumuscu, S. (2016). Rising competitive authoritarianism in Turkey. *Third World Quarterly*, 37(9), 1581–1606. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1135732>
- Fenner, M. (2012). Crowdsourcing the Analysis of Scholarly Tweets. *Front Matter*. <http://dx.doi.org/10.53731/r294649-6f79289-8cw2p>

- Hanley, S., & Vachudova, M. A. (2018). Understanding the illiberal turn: Democratic backsliding in the Czech Republic. *East European Politics*, 34(3), 276–296. <https://doi.org/10.1080/21599165.2018.1493457>
- Huntington, S. P. (2012). *The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century*. University of Oklahoma Press.
- Huq, A. Z., & Ginsburg, T. (2017). How to Lose a Constitutional Democracy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>
- Hyde, S. D. (2020). Democracy's Backsliding in the International Environment. *Science*, 369(6508), 1192–1196. <https://doi.org/10.1126/science.abb2434>
- Idea. (2021). *The Global State of Democracy 2021: Building Resilience in a Pandemic Era*. <https://www.idea.int/publications/catalogue/global-state-democracy-2021-building-resilience-pandemic-era>
- Krekó, P., & Enyedi, Z. (2018). Orbán's Laboratory of Illiberalism. *Journal of Democracy*, 29(3), 39–51. <https://doi.org/10.1353/jod.2018.0043>
- Lindberg, S. I. (2021). *The Nature of Democratic Backsliding in Europe*. Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/research/2018/07/the-nature-of-democratic-backsliding-in-europe?lang=en&center=europe>
- Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: What is new about it? *Democratization*, 26(7), 1095–1113. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029>
- Mietzner, M. (2021). *Democratic Deconsolidation in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Ng, D. T. K., Ching, A. C. H., & Law, S. W. (2023). Online Learning in Management Education amid the Pandemic: A Bibliometric and Content Analysis. *The International Journal of Management Education*, 21(2), 100796. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100796>
- Schaer, P. (2013). Applied Informetrics for Digital Libraries: An Overview of Foundations, Problems and Current Approaches. *Historical Social Research / Historische Sozialforschung*, 38(3), 267–281.
- Sedelmeier, U. (2013). Anchoring democracy from above? The European Union and democratic backsliding in Hungary and Romania after accession. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 52(1), 105–121. <https://doi.org/10.1111/jcms.12082>
- Stenner, K. (2021, February 11). After the Capitol Insurrection, the United States must Understand The Psychological Underpinnings of Authoritarianism and the Populist Appeal of Trump. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2021/02/11/capitol-insurrection-trump-authoritarianism-psychology-innate-fear-envy-change-diversity-populism/>
- Waldner, D., & Lust, E. (2018). Unwelcome change: Coming to terms with Democratic backsliding. *Annual Review of Political Science*, 21(1), 93–113. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050517-114628>

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan dana untuk penelitian ini.

